



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

13 – 14 September 2023



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

14 / 09 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	<p>Rabu, 13 September 2023</p> <p>https://www.inews.id/finance/bisnis/pupr-target-39-proyek-kpbu-senilai-rp252-triliun-di-2024</p> <p>PUPR Target 39 Proyek KPBUsenilai Rp252 Triliun di 2024</p> <p>Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna</p> <p>Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan pemerintah saat ini sedang mengejar target 39 proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUsenilai Rp252 triliun di 2024. Proyek tersebut terdiri atas 16 proyek KPBUsenilai Rp69,01 triliun dalam tahap penyiapan dan 23 proyek kpbu senilai Rp183,78 triliun dalam tahap transaksi. Kita menyadari bahwa APBN hanya bisa membiayai kurang lebih 30-37 persen dari kebutuhan infrastruktur yang ada. Sehingga, untuk memperbesar infrastruktur yang dibangun perlu dilakukan kerja sama dengan pihak lain, contohnya seperti swasta dan juga lembaga pembiayaan. Dalam skema kerja sama tersebut, pemerintah bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerja sama. Pemerintah kemudian akan membuat perjanjian kerja sama dengan badan usaha pelaksana. Ini juga dilengkapi dengan skema penjaminan, terutama berkaitan dengan risiko-risiko politik oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).</p>	+
2	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER	<p>Rabu, 13 September 2023</p> <p>https://gopos.id/pupr-pemkab-pohuwato-bangun-perumahan-lagi-untuk-mbr/</p> <p>PUPR-Pemkab Pohuwato Bangun Perumahan Lagi untuk MBR</p> <p>Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Hery Tri Saputra Zuna</p>	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

14 / 09 / 2023

| Analisis Pemberitaan Media Online

RESUME
<p>Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato mendapat bantuan perumahan berwawasan lingkungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pemenuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal itu diwujudkan dengan peletakan batu pertama yang berlokasi di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Rabu (13/9/2023). Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Hery Tri Saputra Zuna menjelaskan, menyediakan rumah bagi masyarakat ini tantangannya luar biasa, dari bagaimana inisiatif pemerintah daerah sebagai tulang punggung, peran pemerintah pusat dan paling utama peran badan usaha.</p>



13 / 09 / 2023

| Sumber: iNews.id

PUPR Target 39 Proyek KPBU Senilai Rp252 Triliun di 2024

Author: Michelle Natalia

Editor: Puti Aini Yasmin

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan pemerintah saat ini sedang mengejar target 39 proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp252 triliun di 2024. Proyek tersebut terdiri atas 16 proyek KPBU dengan nilai Rp69,01 triliun dalam tahap penyiapan dan 23 proyek kpbu senilai Rp183,78 triliun dalam tahap transaksi.

KPBU dalam penyelenggaraan infrastruktur ini merupakan alternatif dari pembiayaan infrastruktur yang sudah ada, yang selama ini menggunakan APBN. "Kita menyadari bahwa APBN hanya bisa membiayai kurang lebih 30-37 persen dari kebutuhan infrastruktur yang ada. Sehingga, untuk memperbesar infrastruktur yang dibangun perlu dilakukan kerja sama dengan pihak lain, contohnya seperti swasta dan juga lembaga pembiayaan," ujar Herry dalam IDX Channel Market Review di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Dalam skema kerja sama tersebut, pemerintah bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerja sama. Pemerintah kemudian akan membuat perjanjian kerja sama dengan badan usaha pelaksana. Ini juga dilengkapi dengan skema penjaminan, terutama berkaitan dengan risiko-risiko politik oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

"Dengan demikian, kerja sama ini lebih memberikan keyakinan kepada badan usaha untuk dapat bekerja sama. Melalui cara tersebut, pemerintah bisa membangun infrastruktur terlebih dahulu baru nanti pembayaran terhadap infrastrukturnya dilakukan kemudian setelah infrastrukturnya tersedia," tutur Herry.

Dia mengatakan bahwa skema ini berbeda dengan yang konvensional, yang harus tersedia dulu sepenuhnya baru bisa menikmati infrastrukturnya. Dengan KPBU ini, menurutnya lebih baik karena membangun dulu baru nanti dibayar, baik menggunakan tarif seperti jalan tol atau melalui availability payment atau ketersediaan layanan.

Herry menyebut, ini salah satu kelebihan yang bisa dilakukan dengan KPBU.

"Salah satu yang menonjol adalah penggantian jembatan Callender Hamilton (CH) yang beberapa kali rubuh, dipercepat sekitar 29 jembatan seluruhnya, dan ditargetkan akhir tahun ini selesai, Jadi konsepnya nanti dibangun dulu oleh swasta, baru kemudian pembiayaannya diganti." kata Herry.

<https://www.inews.id/finance/bisnis/pupr-target-39-proyek-kpbu-senilai-rp252-triliun-di-2024>



13 / 09 / 2023

Sumber: gopos.id

PUPR-Pemkab Pohuwato Bangun Perumahan Lagi untuk MBR

Author: Alex

GOPOS.ID, MARISA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato mendapat bantuan perumahan berwawasan lingkungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pemenuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal itu diwujudkan dengan peletakan batu pertama yang berlokasi di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Rabu (13/9/2023).

Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga mengatakan, pembangunan perumahan berwawasan lingkungan ini merupakan bukti nyata pemerintah mendukung program nasional, terutama pemenuhan hunian yang layak bagi MBR.

“Pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni sampai dengan 70 persen melalui berbagai skema bantuan pembiayaan, di antaranya melalui Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) dan skema dukungan pembiayaan lainnya,” ujar Saipul.

Dukungan pembiayaan dari pemerintah atau subsidi sangat dibutuhkan untuk membantu MBR dengan memperoleh akses pembiayaan yang murah dan mudah, dalam mendapat kepemilikan rumah hunian yang layak.

“Kami menaruh harapan besar kiranya kolaborasi stakeholder ini dapat

memberikan peluang bagi warga Pohuwato untuk memperoleh hunian yang layak. Karena dengan adanya program ini kami sangat terbantu memenuhi kebutuhan perumahan,” tambah Saipul.

Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Hery Tri Saputra Zuna menjelaskan, menyediakan rumah bagi masyarakat ini tantangannya luar biasa, dari bagaimana inisiatif pemerintah daerah sebagai tulang punggung, peran pemerintah pusat dan paling utama peran badan usaha.

“Alhamdulillah di Kabupaten Pohuwato menjadi contoh bagi daerah-daerah lain,” ujar Hery.

Kata Hery, Tapera ini bisa untuk ASN, tapi kedepannya untuk lainnya juga seperti TNI/Polri dan sebagainya. Tapi setidaknya untuk ASN, kalau ada ASN yang belum memiliki rumah, silahkan di data dan itu akan coba didorong melalui Tapera.

“Tapera dan BPN saat ini sudah dibuat tabungan BTN perumahan Tapera. Ini disediakan untuk masyarakat yang informal, berupa belum punya slip gaji dia dipersilahkan menabung di BTN,” tutup Hery.

<https://gopos.id/pupr-pemkab-pohuwato-bangun-perumahan-lagi-untuk-mbr/>